

Judul : Mungkinkah motor listrik BGN dihibahkan untuk guru honorer?
Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Mungkinkah Motor Listrik BGN Dihibahkan Untuk Guru Honorer?

Usulan untuk menghibahkan motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer menuai polemik. Ada yang menganggap mubazir dan perlu menunggu proses hukum.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini mengatakan, aset yang telah dibeli menggunakan uang negara sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal agar tidak mubazir. Ia mengaku setuju dengan gagasan yang disampaikan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.

Ia mengatakan telah mendengar rencana BGN untuk menghibahkan motor listrik tersebut kepada guru-guru honorer di berbagai daerah dan menilai langkah itu dapat memberikan manfaat yang lebih

besar bagi masyarakat.

Meski mendukung pemanfaatan aset yang sudah terlanjur dibeli, Yahya menegaskan, sejak awal dirinya tidak menyetujui pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik pada masa kepemimpinan Kepala BGN saat itu.

Menurutnya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau pengelola dapur tidak membutuhkan mobilitas tinggi sehingga pengadaan kendaraan tersebut dinilai tidak mendesak. Ia juga menyoroti minimnya pengawasan terhadap proyek tersebut.

Sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX DPR, kata Yahya, tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik

tersebut. Ia bahkan menyesalkan adanya dugaan markup harga serta fakta bahwa vendor pengadaan disebut tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel layanan.

Sementara itu, Agustina Arumsari menyatakan BGN tengah mengkaji pemanfaatan seluruh barang yang telah dibeli menggunakan anggaran 2025, termasuk motor listrik. Menurutnya, aset yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan penggunaannya agar memberikan manfaat yang optimal.

Arumsari menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk motor listrik, tetapi juga berbagai pengadaan lain seperti perangkat teknologi informasi, laptop, *Internet*

of Things (IoT), hingga CCTV.

Di saat yang sama, BGN melakukan penyaliran anggaran untuk memastikan pengadaan dengan output serupa tidak kembali muncul pada anggaran tahun 2026.

Menurut Arumsari, optimalisasi penggunaan aset yang sudah terlanjur dibeli merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran. Karena itu, prinsip utama yang dipegang BGN adalah memastikan setiap barang yang telah dibeli oleh negara dapat dimanfaatkan secara maksimal sebelum mempertimbangkan pengadaan baru.

Anggota Komisi IX DPR, Lucy Kurniasari, menganggap usulan menghibahkan motor kepada guru honorer merupakan langkah yang

sangatt mulia. "Usulan sepeda motor BGN dihibahkan untuk guru honorer memang baik," ujarnya.

Sementara itu, Manager Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, menilai langkah menghibahkan motor listrik di tengah proses pemeriksaan oleh Kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola.

Menurutnya, aset yang masih berada dalam sengketa atau proses hukum seharusnya tidak didistribusikan terlebih dahulu karena dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap proses penegakan hukum.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Lucy Kurniasari dan Badiul Hadi terkait usulan motor BGN dihibahkan kepada guru honorer, berikut wawancaranya.

LUCY KURNIASARI, Anggota Komisi IX DPR RI

Usulan Ini Mulia, Tapi Tidak Mudah



“

Sebagai barang milik negara, pengalihan sepeda motor kepada guru honorer harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Ada usulan agar motor yang sudah dibeli oleh BGN dihibahkan kepada guru honorer. Bagaimana pandangan Anda?

Usulan sepeda motor BGN dihibahkan kepada guru honorer memang baik, tetapi persoalannya tidak semudah itu. Sepeda motor BGN dibeli menggunakan anggaran APBN. Karena itu, motor tersebut dengan sendirinya menjadi milik negara.

Menurut Anda, apakah perlu dihibahkan atau tidak?

Sepeda motor itu harus diperuntukkan sesuai tujuan awal pembelinya, yaitu untuk Kepala SPPG. Apabila sepeda motor tersebut akan dialihkan kepada guru honorer, prosesnya tentu tidak mudah membalikkan telapak tangan.

Jika memang merupakan ba-

rang milik negara, apakah bisa dialihkan?

Sebagai barang milik negara, pengalihan sepeda motor kepada guru honorer harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Untuk itu, BGN harus mengajukan surat kepada Menteri Keuangan terkait pengalihan peruntukan sepeda motor tersebut.

Apabila Menteri Keuangan menyetujui, barulah sepeda motor itu dapat dialihkan kepada guru honorer. Namun, apabila tidak disetujui, sepeda motor tersebut harus tetap diperuntukkan bagi Kepala SPPG.

Selain itu, saat ini sepeda motor tersebut juga belum dapat didistribusikan kepada siapa pun karena akan dijadikan barang bukti dalam persidangan apabila kasus dugaan korupsi tersebut berlanjut ke pengadilan.

Kapan pun bisa dihibahkan, harus menunggu putusan pengadilan, ya?

Ada kemungkinan sepeda motor itu baru dapat didistribusikan kepada Kepala SPPG setelah perkara tersebut diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun, apabila sepeda motor itu hendak dialihkan kepada guru honorer, selain harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, juga harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

Jadi, mengalihkan peruntukan sepeda motor BGN dari Kepala SPPG kepada guru honorer bukan semata mata persoalan setuju atau tidak setuju. Jika hal ini dijadikan acuan, setiap pembelian barang milik negara akan dengan mudah dialihkan kepada siapa saja. Tentu hal tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam pengadaan barang milik negara. ■ REN

BADIUL HADI, Manager Riset Seknas FITRA

Jangan Sampai Untuk Mengaburkan Jejak



“

Secara prinsip, aset yang masih berstatus sengketa atau berada dalam proses hukum, seharusnya tidak didistribusikan terlebih dahulu.

Bagaimana pandangan Anda mengenai usulan sepeda motor BGN dihibahkan kepada guru honorer?

Langkah menghibahkan kendaraan sepeda motor BGN kepada tenaga honorer di tengah proses pemeriksaan oleh Kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola. Secara prinsip, aset yang masih berstatus sengketa atau berada dalam proses hukum seharusnya tidak didistribusikan terlebih dahulu.

Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam persoalan ini?

Dalam kaidah pengelolaan barang milik negara maupun daerah, prinsip kehati-hatian harus menjadi landasan utama. Jangan sampai kebijakan hibah justru menimbulkan persepsi sebagai upaya mengaburkan jejak atau mengunci status aset sebelum proses hukum selesai berjalan.

Jika tujuannya untuk mengingat

kan manfaat bagi masyarakat, apakah lebih merupakan pilihan yang tepat?

Apabila tujuan kebijakan adalah efisiensi dan memberikan manfaat yang optimal bagi publik, berbagai opsi perlu dipertimbangkan secara terbuka. Salah satunya ialah mengoptimalkan nilai aset melalui ketentuan yang berlaku. Hasilnya kemudian dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih prioritas dan terukur.

Apakah opsi hibah maupun penjualan sama-sama memungkinkan?

Pada prinsipnya, baik hibah maupun penjualan dapat menjadi opsi. Namun, seluruh keputusan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, audit aset yang transparan, serta tidak berentangan dengan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Apa yang perlu dilakukan Pemerintah agar kebijakan terkait aset ini tidak menimbulkan polemik?

Yang terpenting adalah memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Publik berhak mengetahui dasar kebijakan yang diambil, terutama karena aset tersebut sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kebijakan yang terburu-buru justru berisiko menimbulkan pertanyaan dan mengurangi kepercayaan publik.

Apa pesan Anda terkait polemik ini?

Transparansi harus menjadi kunci. Masyarakat berhak memastikan bahwa setiap kebijakan terkait pengelolaan aset negara dilakukan secara hati-hati, berdasarkan aturan yang berlaku, dan tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dapat tetap terjaga. ■ REN